



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. belanja pemeliharaan; dan
- e. monografi jarak dan fasilitas transport bagi pegawai dan keluarga.

Pasal 3

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak terjauh/fasilitas transport bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas dan jasa paket pengiriman barang untuk memperoleh keluaran tertentu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa melebihi harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya resmi lain.
- (3) Pengadaan/pembelian jenis belanja barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan sepenuhnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkepentingan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

Bentuk komisi, premi dan rabat yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 8

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standarisasi Indeks Belanja.

Pasal 9

Standarisasi Indeks Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA)/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) Tahun Anggaran 2013.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 410

DAFTAR ISI

A. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1
1.1 Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan	1
1.2 Panitia/ Tim/ Pekerjaan yang dibentuk untuk memenuhi kegiatan yang bersifat khusus	1
2. Honorarium untuk Pengandaan Konstruksi/Barang/Jasa	3
2.1 Pejabat Pembuat Komitmen	3
2.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3
2.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3
3. Honorarium untuk Jasa Konsultasi	4
3.1 Pejabat Pembuat Komitmen	4
3.2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4
3.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4
4. Honorarium Panitia Pengadaan & Penilai Harga Tanah	4
4.1 Panitia Pengadaan & Penilai Tanah	4
5. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pengandaan Konstruksi/Barang/Jasa	5
5.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5
5.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5
6. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Jasa Konsultasi	5
6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5
6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	5
7. Honorarium Pengelola Keuangan	5
7.1 Pejabat Pengguna Anggaran	5
7.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	5
7.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6
7.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan	6
7.5 Bendahara Pengeluaran	6
7.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu	6
7.7 Pembantu Bendahara Pengeluaran	6
7.8 Bendahara Penerimaan	6
7.9 Pembantu Bendahara Penerimaan	6
7.10 Bendahara Penerimaan Pembantu	7
7.11 Pengurus Barang	7
7.12 Pembantu Pengurus Barang	7
7.13 Penyimpan Barang	7
8. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7
8.1 Jasa Konsultasi	7
8.2 Pekerjaan - pekerjaan Khusus	8
9. Honorarium Upah Tenaga Harian	10
9.1 Upah Harian	10
9.2 Pekerjaan Swakelola	11

10. Uang Pembinaan	12
10.1 Tingkat Kabupaten	12
10.2 Tingkat Propinsi	12
10.3 Tingkat Nasional	12
10.4 Tingkat Internasional	12
10.5 Guru/ Pengawas Berprestasi	12
10.6 Lomba Krenova (Kreativitas Inovasi Masyarakat)	12
10.7 Festival/ Lomba Seni, Karawitan & Lomba-Beregu Lainnya	12
10.8 Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten	12
11. Uang Lembur	12
11.1 Kelebihan Jam Mengajar	12
11.2 Kelebihan Jam Bekerja	12
12. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS & Bantuan Operasional	12
12.1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar PNS	12
12.2 Bantuan Pendidikan & Kursus	12
12.3 Biaya Pendidikan	13
12.4 Bantuan Operasional	13
13. Honorarium Peserta Sosialisasi/ BinteK/ Seminar/ Workshop/ Diklat	13
13.1 Peserta Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/ BinteK/ Pembekalan dan lain-lain	13
13.2 Pengiriman Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	13
14. Honorarium Upah RT/Rw/Pengurus/Anggota Lembaga Desa/Kelurahan	14
15. Honorarium Anggota LPM/ Ormas	14

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Belanja Bahan Pakai habis	15
1.1 Alat Tulis Kantor	15
1.2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender	22
1.3 Alat-alat Listrik dan Elektronika (Lampu pijar/ Batteray kering)	22
1.4 Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	25
1.5 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25
1.6 Bahan Bakar Minyak dan Gas	30
1.7 Peralatan Pemadam Kebakaran	30
1.8 Vandel, Plakat dan Cinderamata	32
1.9 Tiket dan Pulsa	33
2. Belanja Bahan / Material	40
2.1 Bahan Bangunan dan Bahan Baku Bangunan	40
2.2. Satuan Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	52
2.3 Benih dan Bibit	53
2.4 Bahan Baku Makanan dan Tekstil	69
2.5 Bahan Kimia	75
2.6. Bahan Baku Lainnya	76

3. Belanja Jasa Kantor	78
3.1 Surat Kabar/Tabloid/Majalah	78
3.2 Dokumentasi	79
3.3 Jasa Paket pengiriman Barang	81
3.4 Dekorasi	87
3.5 Sertifikasi dan Paten	87
3.6 Jasa Administrasi Kepegawaian	88
3.7 Jasa Kemanusiaan dan Kesehatan	89
3.8 Jasa Publikasi Media Elektronik	89
3.9 Jasa Publikasi Media Cetak	90
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91
4.1 Suku Cadang, Engine Perkim IM-033/1	91
4.2 Suku Cadang Mobil/Truk/Motor	93
4.3 Suku Cadang Mesin Gilas	96
4.4 Suku Cadang Excavator/Bulldozer	96
4.5 Jasa Servis Kendaraan Bermotor	97
4.6 Pajak	98
4.7 BBM, Minyak Pelumas dan Minyak Rem	98
4.8 Ban	98
4.9 Accu	100
4.10 Jasa Service Kendaraan Tak Bermotor	100
4.11 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100
5. Belanja Cetak & Penggandaan	101
5.1 Barang Cetak dan Penggandaan	101
5.2 Fotocopy, Jilid, Laminating dan Print	114
6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	114
6.1 Sewa Sarana Mobilitas Darat	114
6.2 Sewa Sarana Mobilitas Air	115
7. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	115
7.1 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	115
7.2 Sewa Gedung / Kantor / Tempat	115
8. Belanja Sewa Alat	116
8.1 Sewa Alat Berat	117
8.2 Sewa Alat Ukur	117
9. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	118
9.1 Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor & Sekolah	118
10. Belanja Makanan & Minuman	118
10.1 Makanan & Minuman Harian	119
10.2 Makanan & Minuman Rapat	119
10.3 Makanan & Minuman Tamu	119
11. Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	119
11.1 Pakaian Dinas Harian (PDH)	121
11.2 Pakaian Sipil Harian (PSH)	121
11.3 Pakaian Sipil Resmi (PSR)	121
11.4 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	121
11.5 Seragam Harian Pramuka (SHP)	121
11.6 Pakaian Dinas Upacara (PDU)	121

12. Belanja Pakaian Kerja	122
12.1 Pakaian Kerja Lapangan dan Seragam Sekolah	122
12.2 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I Sat Pol. PP	122
12.3 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II Sat Pol. PP	123
12.4 Seragam PDL Satpol PP Lainnya	123
12.5 Seragam PDL Satpam	123
12.6 Seragam PDL Hansip/ Satuan Linmas	124
12.7 Kelengkapan Provos	124
12.8 Kelengkapan PHH	124
12.9 Kelengkapan Pol.PP & Aksesoris Lainnya	124
12.10 Kelengkapan Satpam & Aksesoris Lainnya	125
12.11 Unit Pemadam Kebakaran	126
12.12 Petugas LLAJ	126
12.13 Lembaga Desa/ Kelurahan	126
13. Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu	126
13.1 Pakaian Hansip / Limas	126
13.2 Pakaian Olah Raga & Musik	126
13.3 Pakaian Adat, Ibadah & Pesta	128
13.4 Pakaian Petugas Kesehatan	128
13.5 Pakaian Petugas Pelayanan Perizinan	129
13.6 Pakaian Petugas Paskibraka	129
14. Belanja Perjalanan Dinas	130
14.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	130
14.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138
14.3 Belanja Perjalanan Dinas Pergi Pulang Kurang dari 6 jam	148
14.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Kecamatan	148
14.5 Belanja Perjalanan Pindah Tugas	149
14.6 Belanja Pemulangan Pegawai	150

C. BELANJA MODAL

1. Pengadaan Alat-alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Bengkel	151
1.1 Pengadaan Alat-alat Berat	151
1.2 Pengadaan Kendaraan Bermotor	151
1.3 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	159
1.4 Pengadan Alat Bengkel	159
2. Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Perternakan	161
2.1 Alat-alat Mesin (Pertanian)	161
2.2 Peralatan Perkebunan/ Pertanian	163
2.3 Peralatan Pengolahan Pasca Panen Perkebunan	163
2.4 Alat-alat Perternakan	164
2.5 Alat-alat Kesehatan Hewan	164
2.6 Alat-alat (IB) Inseminasi Buatan	164
2.7 Alat Produksi Perikanan	165
2.8 Penangkap Ikan	165
2.9 Alat Pengepres Jarak	165
2.10 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	165
2.11 Alat Pengendalian/ Pemberantasan Hama/ Penyakit Tanaman	165

3. Pengadaan Peralatan Kantor	165
3.1 Numbering Machine	165
3.2 Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	165
3.3 Alat Pemadam Kebakaran	165
3.4 Mesin Tik	166
3.5 Mesin Hitung Elektronik	166
3.6 Mesin Stensil	166
3.7 Penghancur Kertas	166
3.8 Mesin Absensi	166
3.9 Mesin Foto Copy dan Laminating	166
3.10 Porporasi	167
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor	167
4.1 Peti Uang (Cash Box)	167
4.2 Brand kas	167
4.3 Almari Arsii (Filling Cabinet)	167
4.4 Lain-lain	167
5. Pengadaan Komputer	168
5.1 Laptop	168
5.2 Personal Computer Dekstop	180
5.3 LCD Projektor	185
5.4 Printer	186
5.5 Scanner	188
5.6 GPS Portable	189
5.7 Hard Disk External	190
5.8 Radio Wifi	191
5.9 USB Wifi	191
5.10 Monitor LCD	191
5.11 UPS (Unit Power Supley) Branded	193
5.12 Monitor	194
5.13 Hard Disk Internal	195
5.14 Perlengkapan Komputer	196
5.15 Ribbon Printer	197
5.16 Bluetooth, Jaringan Komputer & Modem	198
5.17 Komponen Komputer	199
5.18 Layar	200
5.19 Printer Multi Fungsi	200
5.20 PDA	200
5.21 Lisensi	200
5.22 Server	201
5.23 Cassing PC	201
5.24 Speaker	201
5.25 Router	202
5.26 Komputer Tablet	202
6. Pengadaan Mebelair	202
6.1 Meja	202
6.2 Kursi	203
6.3 Almari Rak dan Bufet	204
6.4 Proodium/ Mimbar	205
6.5 Alat Percetakan	205
6.6 Roll. 0. PACT	205
6.7 Papan Nama Kantor dan White Board Komplit (Board & Stand)	206

6.8	Meubelir Perpustakaan	206
6.9	Meubelir PKD	206
6.10	Meubelir Lain-lain	206
7.	Pengadaan Peralatan Dapur	207
7.1	Peralatan Makan dan Minum	207
7.2	Thermos	208
7.3	Almari Es (Refrigerator)	208
7.4	Kompas Gas	208
8.	Pengadaan Alat-alat Elektronik	209
8.1	Projektor	209
8.2	Televisi (Berwarna)	209
8.3	Video Compact Disk (VCD)	210
8.4	Radio Cassete	210
8.5	Digital Production Mizer WJ.MX 12	210
8.6	Camera Digital	210
8.7	Cassete	211
8.8	Foto Tustel	212
8.9	Video Kamera & Handycam	212
8.10	Digital Camcoder	212
8.11	Lain-lain	212
9.	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	213
9.1	Facimile	213
9.2	Spare Part	213
9.3	PABX Sentral Telepon	214
9.4	Spare Part PABX	214
9.5	Repeater UHF / FM	216
9.6	Radio Base	217
9.7	Telepon	217
9.8	Siskomdagri	220
9.9	Alat-alat Komunikasi	221
9.10	Pengeras Suara (Loud Speaker)	221
9.11	Lain-lain	222
10.	Pengadaan Alat-alat Kesehatan / Kedokteran	224
10.1	Alat Transfusi Darah PMI	224
10.2	Alat Kesehatan	224
10.3	Peralatan Kesehatan KB	252
10.4	Peralatan Pelayanan Penyakit Menular	255
10.5	Alat Program Pelatihan PKD	256
10.6	Alat Kesehatan PKD	256
10.7	Partus Set	257
10.8	Mini Bedah Set	257
10.9	UKBM Polides Posyandu Balita & Posyandu Manula	257
10.10	Alat Kesehatan POKED	258
10.11	Alat Kedokteran Umum	260
10.12	Pengembangan Rawat Inap	263
10.13	Alat Poliklinik Gigi	263
10.14	Diagnostik Poliklinik Set	264
10.15	THT Set	264
10.16	Peralatan UGD/IGD Set	265

10.17	Alat Kesehatan Lain	265
10.18	Laboratorium	266
10.19	Ruang Perawatan	270
10.20	Alat Kedokteran Hewan	270
10.21	Peralatan Laboratorium Hewan	270
10.22	Barang Linen	271
10.23	Bahan Cuci Laundry	272
10.24	Alkes Inventaris	272
10.25	Keformasian	273
10.26	Alat-alat Radiologi	273
10.27	Pelayanan Laboratorium	274
10.28	Bedah Sentral	274
10.29	Rawat Inap	274
10.30	Rawat Jalan	274
10.31	Gawat Darurat	275
10.32	Perawatan Orang Penderita Cacat	275
11.	Pengadaan Alat-alat Laboratorium	276
11.1	Alat Laboratorium Pertanian	276
11.2	Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah	276
11.3	Alat-alat Laboratorium Bahasa	282
11.4	Alat-alat Laboratorium Bahan Bangunan	282
12.	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Tugu	285
12.1	Pengambilan Sample Air	285
12.2	Konstruksi Tugu	285
13.	Pengadaan Penerangan Jalan,Taman dan Hutan Kota	285
13.1	Listrik dan Penerangan Jalan	285
14.	Pengadaan Buku/ Kepustakaan	290
14.1	Buku SD/MI	290
14.2	Buku SLTP/MTs	292
14.3	Buku SMU/SMK/MA	293
14.4	Buku Kepondokan	294
14.5	Jurusan Bisnis Manajemen	294
14.6	Jurusan Teknik Elektro & Mesin	294
14.7	Jurusan Teknik Bangunan dan Perkayuan	294
14.8	Jurusan Kepariwisata	295
14.9	Semua Jurusan	295
14.10	Kamus	295
14.11	Buku-buku Lain	295
14.12	Microfilm dan CD Perundangan	297
15.	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	298
15.1	Umum	298
15.2	Kebudayaan	298
15.3	Kesenian	298
15.4	Olahraga	299
16.	Pengadaan Hewan/ Ternak dan Tanaman	302
16.1	Tanaman Hias	302
16.2	Tanaman Kehutanan	304

17. Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keselamatan	304
17.1 PHH	304
17.2 Perkakas Pemadam Kebakaran	305
17.3 Peralatan SAR	305
17.4 Lalulintas	307
18. Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	307
18.1 Pompa Air	307
18.2 Alat Penakar Hujan	307
18.3 Mesin Jahit	307
18.4 Setrika	308
18.5 Mesin Cuci	308
18.6 Jam	308
18.7 Kipas Angin	308
18.8 Air Conditioner (AC)	309
18.9 Lain-lain	309
19. Pengadaan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Trafic Light	309
19.1 Markas Jalan	309
19.2 Rambu Lalu Lintas	310
19.3 Trafic Light	310
D. BELANJA PEMELIHARAAN	314
1. Belanja Permeliharaan Jalan dan Jembatan	314
1.1 Belanja Pemeliharaan Jalan	314
1.2 Belanja Pemeliharaan Jembatan Timbang	314
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi)	314
2.1 Pemeliharaan Irigasi	314
3. Belanja Pemeliharaan Jaringan	315
3.1 Pemeliharaan Jaringan Air Minum	315
4. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	320
4.1 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	320
5. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar	322
5.1 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar Darat	322
5.2 Belanja Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	322
5.3 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	322
6. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	322
6.1 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Bermesin	322
7. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian	322
7.1 Pemeliharaan Alat-alat Pertanian Bermesin	322
7.2 Pemeliharaan Alat Pertanian Tak Bermesin	322
8. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	323
8.1 Pemeliharaan Alat Kantor Service	323
8.2 Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	324
8.3 Pemeliharaan Komputer	327
8.4 Pemeliharaan Meja & Kursi	327

9. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio & Komunikasi	327
9.1 Pemeliharaan Alat Studio	327
9.2 Pemeliharaan Alat Komunikasi	327
10. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran/ Kesehatan	328
10.1 Pemeliharaan Alat Kedokteran	328
10.2 Pemeliharaan Alat Laboratorium Kesehatan	329
10.3 Pemeliharaan Alat Laboratorium LH	333
11. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan	333
11.1 Pemeliharaan Buku	333
11.2 Pemeliharaan Terbitan Berkala	333
12. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan	333
12.1 Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	333
13. Belanja Pemeliharaan / Pengelolaan Berkas & Arsip Daerah	333
13.1 Pemeliharaan Berkas	334
13.2 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Tekstual	334
13.3 Proses Alih Media Mendiskripsi Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual	334
13.4 Arsip Dinamis In Aktif / Statis Non Tekstual (Foto, Peta, Gambar Teknik)	334
13.5 Proses Alih Media	334
13.6 Pengadaan Kaset Arsip C.60	334
13.7 Pembersihan Arsip dan Perawatan Arsip	334
13.8 Pemeliharaan Arsip Tekstual	334
14. Belanja Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan	334
14.1 Penyampaian & Pemantauan Pengembalian SPOP	334
14.2 Penyebaran SPOP Kolektif	335
14.3 Identifikasi, Verifikasi & Pengukuran Obyek Pajak	335
14.4 Penilaian Massal	336
14.5 Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data Penyempurnaan ZNT/NIR	336
14.6 Pemeliharaan Bisnis Data Sismiop	336
E. MONOGRAFI JARAK (berdasarkan Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003) DAN FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA (berdasarkan Lampiran II Permenkeu Nomor 45/ PMK.05/2007)	
1. Jarak Antar Kota	338
2. Jarak Kelurahan ke Ibukota Kabupaten	339
3. Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	340
4. Jarak Antar Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo	340
5. Jarak Antar Desa di Kecamatan Mojolaban	341
6. Jarak Antar Desa di Kecamatan Grogol	341
7. Jarak Antar Desa di Kecamatan Baki	342
8. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bendosari	342
9. Jarak Antar Desa di Kecamatan Kartasura	343
10. Jarak Antar Desa di Kecamatan Nguter	343
11. Jarak Antar Desa di Kecamatan Tawangsari	344
12. Jarak Antar Desa di Kecamatan Bulu	344
13. Jarak Antar Desa di Kecamatan Weru	345

14. Jarak Antar Desa di Kecamatan Gatak	345
15. Jarak Antar Desa di Kecamatan Polokarto	346
16. Fasilitas Transport bagi Pegawai dan Keluarga	347

**PERATURAN BUPATI
TENTANG
STANDARISASI INDEKS BELANJA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2012**

A. BELANJA PEGAWAI



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2012**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan dan/atau dalam desa/kelurahan hanya diberikan ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulang pergi.
- (2) Jarak antar kota/kabupaten dan/atau antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

E. MONOGRAFI JARAK DAN FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI/ KELUARGA

(berdasarkan Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 dan
Lampiran II Permenkeu Nomor 45/ PMK.05/2007)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
2012**